

A KERJA PENYELACASAN
ERANGKAT DAER
AMATAN PUNGGEIKEI
TAHUN 2024



H KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2024

ARA
AH
LAN

ARN
PEME

DAFTAR ISI

Contents

DAFTAR ISI2

BAB I PENDAHULUAN.....3

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ...10

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....98

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....4

BAB V PENUTUP7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan

yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
-

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
-

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
-

Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
-

25. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 14);
26. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 15);
27. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 35).
28. Peraturan Bupati banjarnegara Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita daerah Kabupaten BanjarnegaraTahun 2022 Nomor 15).

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk:

- a. Menjabarkan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2024 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2024 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
- b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024;
 - b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2024;
-

- c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2024.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan fungsi penunjang kewilayahan.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 terdiri dari 4 program, 9 kegiatan, dan 12 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.174.107.807,-, dengan fokus utama pada Peraturan Bupati Banjarnegara No 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi serta Tata Kerja, Kecamatan memiliki tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah

Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi:

1. Masih lemahnya pemahaman aparatur terhadap tupoksi dan koordinasi antar seksi dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
 2. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas pegawai di kecamatan
 3. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana baik secara kualitas maupun kuantitas.
 4. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap PATEN, Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 5. Rendahnya kemampuan SDM Perangkat Desa dalam penyelenggaraan tertib administrasi desa.
 6. Belum optimalnya pemenuhan pembayaran PBB tepat waktu
-

7. Adanya apatisme,rendahnya partisipasi, belum terpenuhinya keterwakilan perempuan, dan terbatasnya pemahaman tentang isu sosial ekonomi dalam Musrenbang.
8. Rendahnya kemampuan perangkat desa dalam penatausahaan keuangan terkait implementasi DD dan ADD
9. Masih rendahnya kesadaran aparatur pemerintahan desa dalam melakukan implementasi (tidak sesuai juknis) program program peningkatan kesejahteraan masyarakat (penanggulangan kemiskinan, kesehatan , pendidikan,sosial budaya dan keagamaan)
10. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Siskamling dan rendahnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam menumbuhkembangkan Linmas.

Dari 3 program, 6 kegiatan, dan 9 sub kegiatan yang dalam Renja Perangkat Daerah tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten 10 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.174.107.807,-

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau pengurangan pagu, penghapusan, penambahan atau pengurangan program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan tersebut mengubah rincian dalam Renja Perangkat Daerah menjadi 4 program, 9 kegiatan, dan 12 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.2.174.107.807,- Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2022, program/kegiatan/subkegiatan yang bertambah meliputi Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dan Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

Dinamika yang terjadi selama tahun 2022 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2022, tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan adanya pencapaian maupun pelampauan target maupun yang tidak memenuhi target.

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik, Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat, Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Adanya SPPT yang tidak bertuan
 2. Banyaknya SPPT ganda
 3. Kurang bertanggungjawabnya para pemungut PBB di tingkat Desa
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan . Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Ketersediaan SDM Aparatur Pemerintah yang loyal, disiplin serta memiliki etos kerja yang baik dan bertanggungjawab
 2. Adanya kerjasama yang baik antara Kecamatan Punggelan dengan unit – unit Kerja terkait sehingga penyelenggaraan kegiatan dapat dilaksanakan dengan hasil yang optimal
-

3. Pelaksanaan Fasilitasi, Pembinaan, Koordinasi dan Pengawasan pelaksanaan kegiatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa /Kelurahan di dukung oleh semua elemen dinas/instansi lintas sektoral pemerintahan desa dan masyarakat
4. Terjalinnnya komunikasi dan koordinasi yang baik lintas sektoral di lingkungan Kantor Kecamatan Punggelan

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka *(jelaskan implikasi dari poin di atas)*. Pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, diantaranya:

1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran secara prima dengan prosedur yang jelas
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur PATEN
4. Mengoptimalkan pelayanan pembuatan E-KTP dan KK
5. Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6. Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa
7. Meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengawasan administrasi pemerintahan desa
8. Meningkatkan pelaksanaan intensifikasi PBB kepada masyarakat secara optimal

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2021 disajikan pada tabel di bawah ini:

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR KEWILAYAHAN									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMEINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SKM		83,32	83,7	83,66	100	83,7	250.68	2.99
		Nilai SAKIP		CC	CC	CC	CC	B	CC	CC
		Prosentase SPPT PBB yang tersalurkan ke Wajib Pajak		99.64 %	100 %	99.57	99.57	100%		

	pengujian/verifikasi keuangan SKPD	keuangan yang terbayarkan		6 orang						
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/s emesteran	Jumlah laporan keuangan yang disusun		8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perangkat daerah		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan dan Perlengkapan Kantor yang		3 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket

		terpenuhi							
	Penyedia bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang terpenuhi	12 Paket	11 Paket	11 Paket	11 Paket	13 Paket	13 Paket	13 Paket
	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyedia jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terpenuhi	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun
	Penyedia jasa pelayanan umum	Jumlah tenaga administrasi	2 orang	3 orang	3 orang	3 orang	3 orang	3 orang	3 orang

[illegible]

[illegible]

	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Peizinan	Jumlah pengelola operator siak yang terbayarkan		2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang
	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah pengelola SPPT PBB tersalurkan		35.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.500
	PROGRAM MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat							
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terlaksana							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Perangkat Daerah mengampu tiga Indikator. Dari tiga indikator tersebut, dua berstatus tercapai dan satu indikator berstatus tidak tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Merencanakan target kinerja
2. Menyeleraskan perencanaan dengan target kinerja
3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja
4. Melakukan evaluasi capaian kinerja sesuai target dan apa yang telah dilaksanakan

Dalam rangka mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, telah dilakukan upaya-upaya yang meliputi:

1. Melakukan koordinasi internal di OPD
2. Evaluasi terhadap hasil kinerja
3. Optimalisasi Kinerja dan pendampingan agar tercapai target kinerja

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.....
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2027	2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	Nilai SAKIP Kecamatan			B(60)	B(60)	B(61)	B(62)	C(32,34)	CC(58.80)	B(60)	B(60)	B(60)		
2.	SKM Kecamatan			81.50	82.50	83.00	84.00	83,32	83,7	84				

*) Kolom 3 diisi berdasarkan IKK outcome dalam lampiran Permendagri 18/2020

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam mengkoordinasikan urusan, yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan desa dan kelurahan Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPD Tahun 2023-2026, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2024 mencakup urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

1. Belum Optimalnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Non Usaha, Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 2. Belum Optimalnya pemahaman dan kesadaran dalam meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (baru sesuai cascading)
 3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam rangka menunjang Tugas dan fungsi kecamatan sebagai unit kerja perekam data administrasi kependudukan yang secara langsung melayani masyarakat, dan tugas – tugas lain yang terkait Tugas dan Fungsi Kecamatan.
 4. Keterbatasan Kemampuan aparatur kelurahan dan perangkat desa dalam penatausahaan keuangan terkait dengan implementasi DAU Tambahan Kelurahan, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
 - 5 .Belum Optimalnya kesadaran aparatur pemerintah Desa dalam mengerjakan buku-buku Administrasi Desa (tidak sesuai Juknis).
-

1. Belum Optimalnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam merencanakan pembangunan di kelurahan dan desa masing-masing.
 2. Belum Optimalnya kesadaran aparaturn pemerintahan desa dalam melakukan implementasi (tidak sesuai dengan juknis) program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat (penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, dan keagamaan)
- a. Sekretariat
 - 1) Terbatasnya personil yang menguasai dan memahami perencanaan
 - 2) Kurangnya koordinasi antar seksi dalam penyusunan kegiatan dan penganggaran
 - 3) Pemahaman terhadap Tupoksi masih kurang
 - 4) Kurangnya etos kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi
 - 5) Masih Lemahnya jaringan internet
 - 6) Terbatasnya sarana dan prasarana aparaturn yang ada di Kecamatan
 - b. Seksi Tata Pemerintahan
 - 1) Masih rendahnya pemahaman tupoksi perangkat desa
 - 2) Masih kurangnya pengetahuan masyarakat kaitannya dengan penyelenggaraan PATEN di kecamatan
 - 3) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan
 - 4) Rendahnya kemampuan aparaturn desa
 - 5) Kurangnya tertib administrasi desa
 - 6) Masih terdapatnya kekosongan perangkat pemerintahan desa
 - 7) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan aparaturn pemerintah desa dalam melaksanakan kewajiban PBB
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 1) Rendahnya partisipasi masyarakat, keterwakilan perempuan dan apatisme dalam mengikuti Musrenbang
 - 2) Isu yang diangkat dalam Musrenbang masih terbatas pada pembangunan fisik, belum mengarah pada permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya
 - 3) Rendahnya kapasitas aparaturn perangkat desa dalam menyusun laporan pelaksanaan pembangunan desa
 - 4) Persepsi yang salah mengenai fungsi kecamatan pasca berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - d. Seksi Kesejahteraan Rakyat
-

- 1) Kurangnya koordinasi dan respon SKPD dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
 - 2) Masih belum sesuai data penduduk miskin (by name, by address) dengan keadaan sebenarnya sehingga sering terjadi tidak tepat sasaran
 - 3) Tanggung jawab percepatan pencapaian SPM yang utama berada pada PD terkait, Kecamatan sebagai pendukung belum diberikan kewenangan untuk melaksanakan percepatan pencapaian SPM
 - 4) Masih rendahnya keterlibatan Kecamatan dalam penetapan kelompok sasaran penyelenggaraan SPM
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 1) Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
 - 2) Rendahnya kesadaran hukum dalam menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - 3) Meningkatnya angka perceraian
 - 4) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Siskamling dan rendahnya kesadaran aparat pemerintah desa dalam menumbuh kembangkan Linmas

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Rendahnya Mutu Pelayanan Publik
2. Rendahnya Tata Kelola Administrasi
3. Belum optimalnya Pendampingan Desa

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

1. Tantangan (Threat)
 - a. Tuntutan Masyarakat semakin beragam untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas .
-

- b. Masih adanya aparat pemerintah dan kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif.
- c. Kondisi geografis wilayah kecamatan yang berbukit bukit dan tanah yang labil/mudah bergerak mengakibatkan kerusakan infrastruktur transportasi dan bencana tanah longsor sehingga menghambat mobilitas ekonomi sosial masyarakat.

2. Peluang (Opportunities)

Disamping beberapa tantangan diatas Kecamatan Punggelan juga memiliki beberapa peluang yang bisa dioptimalkan, antara lain sebagai berikut:

- a. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- b. Adanya potensi sumberdaya alam yang melimpah, yakni tanaman singkong/ubi kayu,kapulaga,lada/mrica dan kayu albasia yang dapat dikelola untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- c. Terdapat pasar yang cukup besar Pasar Manis,pasar – pasar Desa (Pasar Pon dll)serta banyaknya usaha disektor perdagangan,industri dan jasa yang dapat mendorong pertumbuhan dan menggerakkan ekonomi rakyat.
- d. Adanya dukungan koordinasi lintas sektor di wilayah kecamatan yang mendukung tercapainya sinkronisasi dan integrasi kegiatan lingkup kecamatan antara lain kegiatan Konferensi dinas/rapat koordinasi Muspika, UPT/Instansi dan Kepala Desa secara rutin di tingkat Kecamatan

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangn tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2024 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2022. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2024, sebagai berikut:

- a. Masih lemahnya pemahaman aparatatur terhadap tupoksi dan koordinasi antar seksi dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
- b. Masih Terbatasnya kualitas dan kuantitas pegawai di kecamatan
- c. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana baik secara kualitas maupun kuantitas

- d. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan PATEN , Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- e. Rendahnya kemampuan SDM perangkat desa dalam penyelenggaraan tertib administrasi desa
- f. Belum Optimalnya pemenuhan pembayaran PBB tepat waktu
- g. Adanya apatisme, rendahnya partisipasi, belum terpenuhinya keterwakilan perempuan, dan terbatasnya pemahaman tentang isu sosial ekonomi dalam Musrenbang
- h. Rendahnya kemampuan perangkat desa dalam penatausahaan keuangan desa terkait dengan implementasi DD dan ADD
- i. Masih rendahnya kesadaran aparatur pemerintahan desa dalam melakukan implementasi (tidak sesuai dengan juknis) program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat (penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, dan keagamaan)
- j. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Siskamling dan rendahnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam menumbuh kembangkan Linmas

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun terakhir RPD Tahun 2023-2026. Dalam RPD Tahun 2023-2026, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2026 meliputi:

1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran secara prima dengan prosedur yang jelas
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur PATEN
4. Mengoptimalkan pelayanan pembuatan E-KTP dan KK
5. Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6. Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa
7. Meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengawasan administrasi pemerintahan desa
8. Meningkatkan pelaksanaan intensifikasi PBB kepada masyarakat secara optimal

Strategi dan Kebijakan yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran OPD ini akan menjadi indikasi keberhasilan program dan

kegiatan yang ditetapkan dalam program kerja tahunan (Renja) sebagaimana penggambaran dalam grand fold cascading

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Akhir RKPD tahun 2024
Kabupaten Banjarnegara

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET ANHIL PERIODE RENSTRA KPTD	REALISASI RENJA OPI TAHUN 2022	PROKESAN CAPMAN TARGET RENJA OPI TAHUN 2022	CAPMAN KINERJA DAN KESANGKA PENDAMIAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKSIAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PEMANGKUNG JAWAB				
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	Jumlah Dokumen yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kota Pasir Pengaraian Kabupaten Kota Pasir Pengaraian	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Kepulauan Pasir Pengaraian	
7.01.06.2.01.05		Fasilitas Pelayanan Perumahan	Jumlah Dokumen yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kota Pasir Pengaraian				1 Dokumen	8.000.000.000	Kabupaten Pasir Pengaraian	DANA TRANSFER UMUM DAERAH ALOKASI UMUM						7.000.000.000		
7.01.06.2.01.06		Fasilitas Pelayanan Perumahan	Jumlah Dokumen yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kota Pasir Pengaraian				1 Dokumen	25.000.000.000	Kabupaten Pasir Pengaraian	DANA TRANSFER UMUM DAERAH ALOKASI UMUM						25.000.000.000		Kepulauan Pasir Pengaraian

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2024, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

- 1. Memprioritaskan Kegiatan yang belum terlaksana di tahun 2023
- 2. Melanjutkan kegiatan yang sudah ada di tahun 2023
- 3. Beberapa kegiatan yang belum terdanani agar menjadi prioritas pendanaan dan penambahan pagu anggaran sehingga tidak mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dan Pencapaian Kinerja.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan

HASIL MUSRENBANG RKPD KABUPATEN DI KECAMATAN TAHUN 2024

						a	Punggelan	Mlaya	3 X 1200 M	Rp 180,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah	
2	2187	20-01-2023	WIWI SUSANTI	Bantuan Keuangan kepada Desa-Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) Kecamatan	Perkerasan Jalan Makadam Sidakarya- Simpur Volume 1200m	Dusun Sidakarya Desa Mlaya, Kab. Banjarnegar a	Punggelan	Mlaya	3 X 1200 M	Rp 180,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah	
3	2157	20-01-2023	SISWANTO	Bantuan Keuangan kepada Desa-Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) Kecamatan	Rusaknya Jalan Penghubung Antar Desa Sambong - Kecepit	Desa Sambong, Kab. Banjarnegar a	Punggelan	Sambong	3 X 600 M	Rp 150,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah	
4	2155	20-01-2023	April Kurnianto	Bantuan Keuangan kepada Desa-Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) Kecamatan	Jalan sudah rusak berat dan memersulit akses mobilitas dan lalu lintas masyarakat	Dusun Siwatu (Jalur Timur) Desa Sawangan, Kab. Banjarnegar a	Punggelan	Sawangan	2,5 X 500 M	Rp 125,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah	
5	1537	19-01-2023	LESTANTO	Bantuan Keuangan kepada Desa-Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) Kecamatan	Kesulitan akses jalan, dikarenakan jalan masih tanah sehingga tidak	Dusun Simpur RT 03 / RW 05, Desa Tlaga, Kecamatan Punggelan,	Punggelan	Tlaga	3 X 650 M	Rp 160,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah	

					bisa dilalui kendaraan roda dua maupun roda 4	Kabupaten Banjarnegara, Kab. Banjarnegara	Punggulan Badakarya	2,5 X 400 M	Rp 75,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
II	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa)	UMAR	20-01-2023	6	2233					

							pengerasan jalan desa)	Jalan Rusak parah dan Masih Makadam	Desa Jembangan Dusun tenggalar RT 01 RW 01, Kab. Banjarnegara	Punggeln	Jembangan	2,5 X 450 M	Rp 80,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah	
7	2189	20-01-2023	DIVONO	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa)	Jalan Rusak parah dan Masih Makadam	Desa Jembangan Dusun tenggalar RT 01 RW 01, Kab. Banjarnegara	Punggeln	Jembangan	2,5 X 450 M	Rp 80,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah				
8	1322	18-01-2023	IMAM PURBOYO	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa)	ruas jalan masih tanah dan tidak dapat dilalui pada musim penghujan	jalan gadog Rt 03 Rw 3 Dusun Klontong, Kab. Banjarnegara	Punggeln	Karangsari	3 X 850 M	Rp 100,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah				
9	1375	18-01-2023	SAFRUDIN	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan	Kondisi jalan rusak parah	Ruas Jalan Plabuhan - Karangtengah, Kab. Banjarnegara	Punggeln	Klapan	3 X 450 M	Rp 80,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan				

10	1976	20-01-2023	SISWANTO	Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan desa)	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan desa)	Masih belum layaknya jalan di Dusun Sigering RT 01 RW 01	RT 01 RW/ 01 Dusun Sigering, Kab. Banjarnegar a	Punggeln	Sambong	3 X 600 M	Rp 100,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
11	2047	20-01-2023	April Kurnianto	Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan desa)	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan desa)	jalan desa rusak berat dan sulit untuk akses kendaraan	Dusun Siwatu (Jalur Timur) RT 02, 03, 04, 07 RW 004 Desa Sawangan, Kab. Banjarnegar a	Punggeln	Sawangan	3 X 650 M	Rp 100,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

14	2028	20-01-2023	UMAR	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Kawasan Permukiman: Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah desa/pemukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain))	Belum Mempunyai Sarana Pengolahan Sampah Yang Baik	Desa Badakarya, Kecamatan Punggelan, Kab. Banjarnegara	Punggelan	Badakarya	1 PAKET	Rp 50,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah	
15	1122	18-01-2023	WARSO	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Kawasan Permukiman: Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah desa/pemukiman (penampungan, bank sampah, dan	Banyaknya sampah rumah tangga dan sampah pasar yang belum ditampung dalam satu tempat	Desa Danakerta Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, Kab. Banjarnegara	Punggelan	Danakerta	1 PAKET	Rp 50,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah	

16	1538	19-01-2023	Suharno	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Kawasan Permukiman: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan fasilitas pengelolaan sampah desa/ pemukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain))	Masih banyaknya sampah rumah tangga dan ruko yang dibuang di sembarang tempat	Desa Kecepit Kec. Punggelan, Kab. Banjarnegara	Punggelan	Kecepit	1 PAKET	Rp 50,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
17	1141	18-01-2023	SANGKUN	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Kawasan Permukiman: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan	Desa Belum punya tempat pembuangan sampah (TPS)	Desa Sidarata, Kab. Banjarnegara	Punggelan	Sidarata	1 PAKET	Rp 50,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

[illegible]

18	2031	20-01-2023	UMAR	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Kawasan Permukiman: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sumber air bersih milik desa (mata air/tandon penampungan air hujan/ sumur bor))	Adanya Sumber Air Bersih Yang Belum Terbangun dan Dimanfaatkan Secara Maksimal	Dusun Waratirta, Kab. Banjarnegara	Punggelan	Badakarya	1 UNIT	Rp 150,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah	
19	1904	19-01-2023	WARSO	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Kawasan Permukiman: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sumber air bersih milik desa (mata air/tandon penampungan air hujan/ sumur bor))	Kurangnya air untuk memenuhi kebutuhan warga yang menggunakan layanan PAMSIMAS karena masih menggunakan sumur gali sehingga dibutuhkan sumur bor	Dusun Cibungur RT 03 RW 06, Kab. Banjarnegara	Punggelan	Danakerta	1 UNIT	Rp 300,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah	

21	2039	20-01-2023	UMAR	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Kawasan Permukiman/ Pemugaran/ pembangunan rumah tidak layak huni warga desa)	Masih Banyak Rumah Yang Belum Layak Huni	Badakarya, Kab. Banjarnegara	Punggelan	Badakarya	20 UNIT	Rp 500,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah	
22	1155	18-01-2023	WARSO	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Kawasan Permukiman/ Pemugaran/ pembangunan rumah tidak layak huni warga desa)	Masih banyak rumah warga yang tidak layak huni	Desa Danakerta Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, Kab. Banjarnegara	Punggelan	Danakerta	20 UNIT	Rp 500,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah	
23	1519	19-01-2023	Suharno	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Kawasan Permukiman/ Pemugaran/ pembangunan rumah tidak layak huni warga desa)	Masih banyak rumah warga yang tidak layak huni	Desa Kecepit Kecamatan Punggelan, Kab. Banjarnegara	Punggelan	Kecepit	20 UNIT	Rp 500,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah	

[illegible]

1324	25	18-01-2023	IMAM PURBOYO	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Kesehatan: Pemeliharaan sarana/prasarana pos pelayanan terpadu/pondok bersalin desa/Pos Kesehatan Desa)	atap gedung PKD sudah rusak sehingga pelaksanaan pelayanan tidak optimal	Rt 01 Rw 3 Dusun Klontong, Kab. Banjarnegara	Punggelan	Karang Sari	1 UNIT	Rp 150,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
1997	26	20-01-2023	SISWANTO	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Kesehatan: Pemeliharaan sarana/prasarana pos pelayanan terpadu/pondok bersalin desa/Pos Kesehatan Desa)	Masih belum layaknya Pos Kesehatan Desa	Desa Sambong, Kab. Banjarnegara	Punggelan	Sambong	1 UNIT	Rp 150,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
VIII	-			Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Kesehatan: Pengadaan/ pemeliharaan/ pengembangan/ pemeliharaan, sarana dan prasarana kesehatan/air bersih/sanitasi/kebersihan lingkungan/ jambanisasi/MCK)							

27	2048	20-01-2023	UMAR	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Kesehatan: Pengadaan/ pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan, sarana dan prasarana kesehatan/air bersih/sanitasi/kebersihan lingkungan/ jambanisasi/MCK)	Masih Banyak Masyarakat Yang Belum Punya Jamban Sehat	Badakarya, Kab. Banjarnegara	Punggelan	Badakarya	30 UNIT	Rp 150,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah	
28	1110	18-01-2023	WARSO	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Kesehatan: Pengadaan/ pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan, sarana dan prasarana kesehatan/air bersih/sanitasi/kebersihan lingkungan/	Masih banyak rumah warga yang belum memiliki jamban sehat (120 Rumah Tangga)	Desa Danakerta Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, Kab. Banjarnegara	Punggelan	Danakerta	120 UNIT	Rp 600,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah	

29	898	17-01-2023	WARSONO	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Kesehatan: Pengadaan/ pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan, sarana dan prasarana kesehatan/air bersih/sanitasi/kebersihan lingkungan/ jambanisasi/MCK)	Masih rendahnya kepemilikan jamban sehat (150 Rumah Tangga)	Desa Petuguran, Kab. Banjarnegara	Punggelan	Petuguran	150 UNIT	Rp 750,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
30	1966	20-01-2023	SISWANTO	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Kesehatan: Pengadaan/ pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan, jambanisasi/MCK)	Masih banyaknya Warga yang belum memiliki Jamban Sehat (70 Rumah Tangga)	Desa Sambong, Kab. Banjarnegara	Punggelan	Sambong	70 UNIT	Rp 350,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

31	1137	18-01-2023	SANGKUN	sarana dan prasarana kesehatan/air bersih/sanitasi/kebersihan lingkungan/jambanisasi/MCK) Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Kesehatan: Pengadaan/ pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan, sarana dan prasarana kesehatan/air bersih/sanitasi/kebersihan lingkungan/jambanisasi/MCK)	banyak warga belum punya jamban jumlah 70 unit Desa Sidorata, Kab. Banjarnegara	Punggulan	Sidorata	70 UNIT	Rp 350,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
32	1195	18-01-2023	IMAM PURBOYO	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/	kondisi jalan yang sudah rusak dan tidak adanya sarana dan prasarana bangunan pendukung (76 Rumah dusun kerajan Rt 06 Rw 1, Kab. Banjarnegara	Punggulan	Karangsari	76 UNIT	Rp 380,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

[illegible]

[illegible]

35	1452	19-01-2023	Suharno	rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jembatan desa)	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jembatan desa)	Akses Jembatan sudah tidak layak untuk dilalui (Jalan Desa)	Dusun Blabar Rt 09 Rw 02 Desa Kecepit Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara	Punggelan	Kecepit	1 UNIT	Rp 150,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
36	1442	19-01-2023	WARSONO	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jembatan desa)	Jembatan penghubung RT 004 - RT 005 RW 01 Dusun Tangkisan Desa Petuguran, Kab. Banjarnegara	RT 004 - RT 005 RW 01 Dusun Tangkisan Desa Petuguran, Kab. Banjarnegara	Punggelan	Petuguran	1 UNIT	Rp 150,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah	

37	850	17-01-2023	TOFIK	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jembatan desa)	Ruas Jalan Kabupaten Pasar Manis Punggelan Jembatan Grengseng masih sempit (Jalan Desa)	Grengseng, Dusun Jebug, Kab. Banjarnegara	Punggelan	Punggelan	1 UNIT	Rp 150,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah	
38	1568	19-01-2023	LESTANTO	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jembatan desa)	kondisi jembatan yang merupakan akses menghubungkan menuju Desa sebelah (Desa Mlaya) belum bisa dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4 sehingga mengakibatkan warga sekitar yang sebagian besar petani/pekeb	Dusun Simpar, Desa Tlaga, Kabupaten Banjarnegara, Kab. Banjarnegara	Punggelan	Tlaga			Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah	

30	918	17-01-2023	ERRY TRI HERTANTO	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jembatan desa)	Rehabilitasi Jembatan Gantung yang berusia 50 tahun yang sudah keropos kerangka besi dan kayunya, padahal itu menjadi akses terdekat bagi para pelajar dan pedagang di desa Tribuana. (Jembatan Gantung Penghubung antar Desa dan antar Kecamatan)	Dusun Trisi RT. 03 RW. 01, Kab. Banjarnegar a	Punggelan	Tribuana	1 UNIT	Rp 150,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
----	-----	------------	----------------------	--	--	---	-----------	----------	--------	-------------------	---

40	1381	18-01-2023	SAFRUDIN	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jembatan desa)	Akses jalan usaha tani masih terputus karena belum ada jembatan (Jalan Desa)	Ruas Jalan Karangpoh - Sawah Tengah, Kab. Banjarnegara	Punggelan	Klapa	1 UNIT	Rp 150,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
-	XI	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan sarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab curvert, drainase, prasarana jalan lainnya))									
41	2072	20-01-2023	UMAR	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan sarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab curvert, drainase, prasarana jalan	Jalan Rusak (Pembangunan gorong - gorong)	Dusun Kruncang, Kab. Banjarnegara	Punggelan	Badakarya	4 UNIT	Rp 100,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

42	1115	18-01-2023	WARSO	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan sarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab curvert, drainase, prasarana jalan lainnya))	Sebagian jalan di Dusun Kandangserang RT 03 RW 02 Desa (Blok Kwali) masih rusak dan kondisi drainase jalan masih berupa tanah	Dusun Kandangserang RT 03 RW 02 Desa Danakerta, Kab. Banjarnegara	Punggelan	Danakerta	2,5 X 300 M	Rp 80,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
43	2190	20-01-2023	DIYONO	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/	masih banyak jalan yang tidak ada badan jalannya dan harus di talud	Desa Jembangan, Kab. Banjarnegara	Punggelan	Jembangan	1,2 X 150 M	Rp 150,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

44	1221	18-01-2023	IMAM PURBOYO	rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan sarana jalan desa (gorong- gorong, selokan, box/slab curvert, drainase, prasarana jalan lainnya))	belum adanya sarana bangunan pendukung jalan sehingga jalan mudah rusak 2.018 m	Dusun Karangasem , Kab. Banjarnegar a	Punggelan	Karang Sari	2,5 X 2.018 M	Rp 250,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah		
----	------	------------	-----------------	---	---	---	-----------	-------------	------------------	-------------------	---	--	--

45	942	17-01-2023	WIWI SUSANTI	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan sarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab curvert, drainase, prasarana jalan lainnya))	Pengaspalan Jalan Tiagasana Sampai Semangkung Ruas Jalan Kaliwadas - Sidakarya 2000 M	Desa Mlaya Kecamatan Punggulan Kabupaten Banjarnegara, Kab. Banjarnegara	Punggulan	Mlaya	3 X 2.000 M	Rp 250,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah	
46	1432	19-01-2023	WARSONO	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan sarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab curvert, drainase,	Jembatan penghubung Dusun Jombok Desa Petuguran dan Dusun Kaliduren desa Purwasana kondisinya rusak (800 M)	RT 004 RW 06 Dusun Jombok Desa Petuguran , Kab. Banjarnegara	Punggulan	Petuguran	3 X 800 M	Rp 200,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah	

47	1972	20-01-2023	SISWANTO	prasarana jalan lainnya))	Air hujan sering mengalir ke jalan sehingga merusak konstruksi jalan, sehingga dibutuhkan Drainase	Dusun Sigering , Kab. Banjarnegara	Punggelan	Sambong	0,4 X 0,5 X 250 M	Rp 150,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah	
48	2019	20-01-2023	April Kurnianto	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan sarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab curvert, drainase, prasarana jalan lainnya))	belum adanya talud di jalan desa dusun guruh menyebabkan air hujan yang turun mengalir ke	Dusun Guruh RT 02 RW 02 Desa Sawangan , Kab. Banjarnegara	Punggelan	Sawangan	0,4 X 0,5 X 500 M	Rp 300,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah	

[illegible]

		Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pemeliharaan jalan desa)																	
50	1084	18-01-2023	WARSO	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pemeliharaan jalan desa)	Merupakan jalan utama dari Dusun Brak ke Dusun Kandangseran g dan menuju Kabupaten Purbalingga yang kondisi jalannya sudah rusak parah dan membutuhkan perbaikan	Dusun Kandangseran RT 04 RW 02 s/d Dusun Kandangseran RT 02 RW 03, Kab. Banjarnegara	Punggelan	Danakerta	3 X 600 M	Rp 100,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah								
51	672	16-01-2023	TOFIK	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:	Ruas Jalan Kurang memadai -Ke Desa Sidarta (600 m)	Dusun Sicina, Kab. Banjarnegara	Punggelan	Punggelan	3 X 600 M	Rp 100,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah								

					Pemeliharaan jalan desa)												
52	1150	18-01-2023	SANGKUN	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pemeliharaan jalan desa)	Jalan Silongok Dusun Sidakarsa Desa Sidarata RT 01 RW 06 rusak parah	Dusun Sidakarsa RT 01 RW 06 Desa Sidarata , Kab. Banjarnegara	Punggelan	Sidarata	3 X 600 M	Rp 100,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah						
-	XIII	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pendidikan: Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/Taman Kanak-Kanak/Taman Pendidikan Al Qur'an/Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an/TPQ/Madrasah Non Formal)															
53	2192	20-01-2023	DIYONO	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pendidikan: Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/Taman Kanak-Kanak/Taman Pendidikan Al Qur'an/Taman Kanak-Kanak Al-	Masih Banyak TK/ PUAD yang tidak mempunyai APE dalam dan Luar	Desa Jembangan, Kab. Banjarnegara	Punggelan	Jembangan	1 UNIT	Rp 50,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah						

54	1950	20-01-2023	SISWANTO	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pendidikan: Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/Taman Kanak-Kanak/Taman Pendidikan Al Qur'an/Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an/TPQ/Madr asah Non Formal)	Kurangnya Ruang Belajar dan Kamar Mandi TK PGRI Sambong	TK PGRI SAMBONG , Kab. Banjarnegara	Punggelan	Sambong	1 UNIT	Rp 100,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah		
	XIV	Bantuan Sosial Penanganan RTLH											
55	1090	18-01-2023	WARSO	Bantuan Sosial Penanganan RTLH	Masih banyak rumah warga yang belum	Desa Danakerta, Kab. Banjarnegara	Punggelan	Danakerta	30 UNIT	Rp 150,000,000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan		

					layak huni	a						Lingkungan Hidup
56	1380	18-01-2023	SAFRUDIN	Bantuan Sosial Penanganan RTLH	Masih banyak Rumah Tidak Layak Huni	Desa Klapa, Kab. Banjarnegar a	Punggeln	Klapa	30 UNIT	Rp 150,000,000		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
57	1524	19-01-2023	LESTANTO	Bantuan Sosial Penanganan RTLH	Masih banyak rumah warga yang belum layak huni	Desa Tlaga, Kecamatan Punggeln, Kabupaten Banjarnegar a, Kab. Banjarnegar a	Punggeln	Tlaga	40 UNIT	Rp 200,000,000		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	XV	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa										
58	1398	19-01-2023	WARSO	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lokasi Perbatasan Desa Danakerta - Kab Purbalingga/Desa Panunggalan)	Belum adanya gapura / tugu batas desa dan batas kabupaten	Desa Danakerta Kecamatan Punggeln, Kab. Banjarnegar a	Punggeln	Danakerta	1 UNIT	Rp 100,000,000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

[illegible]

[illegible]

63	1567	19-01-2023	Suharno	Pelatihan Manajemen Usaha Kecil (MUK)	Banyaknya Pelaku UMKM di Desa Kecepit yang belum bisa mengembang- kan usahanya secara maksimal (Kelompok ...)	Desa Kecepit, Kec. Punggelan, Kab. Banjarnegar a	Punggelan	Kecepit	1 KEG	Rp 30,000,000	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
64	1010	17-01-2023	TOFIK	Pelatihan Manajemen Usaha Kecil (MUK)	Banyaknya Pelaku UMKM di Desa Punggelan yang belum bisa mengembang- kan usahanya secara maksimal sehingga dalam menjalankan usaha di butuhkan bimbingan agar bisa lebih berkembang lagi (Kelompok Karya Domba)	Desa Punggelan, Kab. Banjarnegar a	Punggelan	Punggelan	1 KEG	Rp 50,000,000	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	

65	1166	18-01-2023	SANGKUN	Pelatihan Manajemen Usaha Kecil (MUK)	Ketrampilan Bagi mantan Pasien ODGJ	Desa Sidarata , Kab. Banjarnegara	Punggelan	Sidarata	1 KEG	Rp 30,000,000	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
	XXI	Pelindungan, Pengemban gan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya (Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota)										
66	1555	19-01-2023	Suharno	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya (Pelestarian	Alat Kesenian Kuda Lumping yang sudah tidak layak dikarenakan sudah lama	Desa Kecepit Kec. Punggelan, Kab. Banjarnegara	Punggelan	Kecepit	1 PAKET	Rp 25,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	

[illegible]

[illegible]

71	2196	20-01-2023	DIYONO	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Jalan Kabupaten	Masih Banyak Sekali jalan kabupaten belum ada drainase	Desa Jembangan, Kab. Banjarnegara	Punggelan	Jembangan	600 M	Rp 450,000,000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
72	913	17-01-2023	HERI AGUS STIAJI	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Jalan Kabupaten	Terperuhnya tepi jalan tanpa aman.memadahi	Ruas jalan Tanjungtirta - Sipoh - Punggelan, Kab. Banjarnegara	Punggelan	Tanjungtirta	800 M	Rp 500,000,000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
-	XXV	Pembangunan Sarana Air Bersih (SAB)									
73	1401	19-01-2023	WARSO	Pembangunan Sarana Air Bersih (SAB)	Kebutuhan air bersih warga selama ini belum tercukupi karena masih mengandalkan sumur gali mandiri	Dusun Kandangserang RT 03 RW 02, Kab. Banjarnegara	Punggelan	Danakerta	1 UNIT	Rp 100,000,000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
74	1378	18-01-2023	SAFRUDIN	Pembangunan Sarana Air Bersih (SAB)	Kekurangan air bersih pada saat musim	Dusun Kalibenda RT 02 RW 05, Kab. Banjarnegara	Punggelan	Klapa	1 UNIT	Rp 100,000,000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

75	1502	19-01-2023	LESTANTO	Pembangunan Sarana Air Bersih (SAB)	Pada saat musim kemarau masih terdapat wilayah di Desa Tlaga khususnya Dusun Simpar, Dusun Slimpet, Dusun Gumelar, Dusun Gumpang Desa Tlaga, Kab. Banjarnegara	Punggulan Tlaga	1 UNIT	Rp 200,000,000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
XXVI				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD					

76	1208	18-01-2023	IMAM PURBOYO	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD	belum adanya pagar pengaman gedung sekolah	Desa Karangsari Rt 04 Rw 1 SD N Karangsari I, Kab. Banjarnegar a	Punggelan	Karangsari	1 UNIT	Rp 150,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
-	XVII	Pembangun an turap/talud /bronjong Jalan Kabupaten										
77	1373	18-01-2023	SAFRUDIN	Pembangunan turap/talud/bronjo ng Jalan Kabupaten	Banyak tebing yang longor sehingga mengakibatk a n bahu jalan menjadi sempit	Ruas Jalan Danakerta - Klapa, Kab. Banjarnegar a	Punggelan	Klapa	1 X 250 M	Rp 200,000,000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
78	2098	20-01-2023	SISWANTO	Pembangunan turap/talud/bronjo ng Jalan Kabupaten	Rusaknya Talud Pengaman Jalan Jalan Kabupaten	Dusun Gemilang, Kab. Banjarnegar a	Punggelan	Sambong	1 X 200 M	Rp 150,000,000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
79	908	17-01-2023	HERI AGUS STIAJI	Pembangunan turap/talud/bronjo ng Jalan	Tersedia jalan yang kuat dan aman Jalan	Dusun Siwaru Rt 01/01, Kab. Banjarnegar	Punggelan	Tanjungtirta	1,5 X 200 M	Rp 250,000,000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan	

				Kabupaten	Kabupaten	a						Lingkungan Hidup
XXVIII	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	20-01-2023	UMAR	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Jalan Perlu Peningkatan	Jalan Usaha Tani Sawah Pendok, Kab. Banjarnegara	Punggelan	Badakarya	2 X 800 M	Rp 150,000,000	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	
81	1566	19-01-2023	WARSO	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Sebagian besar Jalan Usaha Tani di Desa Danakerta masih berupa jalan tanah yang sempit dan membutuhkan pelebaran dan pengerasan jalan serta	Desa Danakerta, Kab. Banjarnegara	Punggelan	Danakerta	2 X 300 M	Rp 80,000,000	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	

82	1492	19-01-2023	Suharno	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	drainase Blok Mangli	Ruas Jalan Sijambu - Siterbang Dusun Blabar Desa Kecepit, Kab. Banjarnegara	Punggelan	Kecepit	2 X 800 M	Rp 150,000,000	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	
83	1376	18-01-2023	SAFRUDIN	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Kondisi jalan rusak parah sebagian masih tanah	Ruas Jalan Plabuhan - Jembelong, Kab. Banjarnegara	Punggelan	Klapa	2 X 500 M	Rp 100,000,000	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	
84	933	17-01-2023	WIWI SUSANTI	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Pengerasan Jalan Usaha Tani Dusun Semangkung Blok Kebon Lor	Dusun Semangkung Desa Mlaya Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, Kab. Banjarnegara	Punggelan	Mlaya	2 X 500 M	Rp 100,000,000	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	

85	1977	20-01-2023	SISWANTO	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Belum Layaknya Jalan Usaha Tani RT 02 RW 04 Dusun Poncol	Dusun Poncol RT 02 RW 04, Kab. Banjarnegara	Punggelan	Sambong	2 X 600 M	Rp 150,000,000	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	
86	2050	20-01-2023	April Kurnianto	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	akses jalan sulit karena masih makadam	Dusun Siwatu RT 02 RW 004 (Sirompeng) Desa Sawangan, Kab. Banjarnegara	Punggelan	Sawangan	2 X 600 M	Rp 150,000,000	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	
87	931	17-01-2023	ERRY TRI HERTANTO	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Dengan luasnya wilayah Desa Tribuana yang berupa sawah dan perkebunan, mengakibatkan sangat diperlukannya peningkatan jalan usaha tani untuk menunjang produktifitas petani dalam	Desa Tribuana, Kab. Banjarnegara	Punggelan	Tribuana	2 X 600 M	Rp 150,000,000	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	

[illegible]

89	1564	19-01-2023	Suharno	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kurangnya pengetahuan pengelolaan administrasi pemerintahan desa	Desa Kecepit, Kec. Punggelan, Kab. Banjarnegara	Punggelan	Kecepit	1 KEG	Rp 30,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
90	856	17-01-2023	TOFIK	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kurangnya pengetahuan pengelolaan administrasi pemerintahan desa	Desa Punggelan, Kab. Banjarnegara	Punggelan	Punggelan	1 KEG	Rp 30,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
-	XXXI	Pemeliharaan Jalan Kabupaten									
91	2197	20-01-2023	DIYONO	Pemeliharaan Jalan Kabupaten	Sudah Banyak jalan yang rusak ruas jalan punggelan jembatan	Desa Jembangan, Kab. Banjarnegara	Punggelan	Jembangan	800 M	Rp 200,000,000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
92	944	17-01-2023	WARSONO	Pemeliharaan Jalan Kabupaten	Jalan Tanjungtirta - Sampang Rusak parah	Desa Petuguran, Kab. Banjarnegara	Punggelan	Petuguran	3000 M	Rp 800,000,000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

95	1382	18-01-2023	SAFRUDIN	dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kapasitas Kelembagaan LKD belum memadai	Desa Klapa, Kab. Banjarnegara	Punggelan	Klapa	1 KEG	Rp 20,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Berencana	
-	XXXIII	Peningkatan Perikanan Berbasis Masyarakat											
96	1903	19-01-2023	WARSO	Peningkatan Perikanan Berbasis Masyarakat	Berkembangnya potensi budidaya perikanan di Desa Danakerta namun warga	Desa Danakerta, Kab. Banjarnegara	Punggelan	Danakerta	1 KEG	Rp 50,000,000	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan		

[illegible]

[illegible]

102	1128	18-01-2023	SANGKUN	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD	gedung rusak 2 lokal	Desa Sidarata rt 01 rw 01, Kab. Banjarnegara	Punggelan	Sidarata	1 UNIT	Rp 300,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
103	1145	18-01-2023	WARSO	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD	2 gedung belajar siswa dan meubeler di MI Muhammadiyah 2 Danakerta kondisinya rusak sehingga mengganggu proses belajar mengajar	Dusun Kandangserang Desa Danakerta RT 02 RW 04, Kab. Banjarnegara	Punggelan	Danakerta	1 UNIT	Rp 300,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
104	1213	18-01-2023	IMAM PURBOYO	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD	belum tersedianya pagar keliling sekolah	SD N Karangasari I Rt 04 Rw I Dusun Kerajan, Kab. Banjarnegara	Punggelan	Karangasari	1 UNIT	Rp 300,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
-	XXXVI I	Rekonstruksi Ruas Jalan Kabupaten (Peningkatan Jalan, Pelebaran Jalan)									

105	1092	18-01-2023	WARSO	Rekonstruksi Ruas Jalan Kabupaten (Peningkatan Jalan, Pelebaran Jalan)	Kondisi Jalan dari Alfamart (Dusun Brak) sampai dengan Desa Sambong kurang lebar dan kondisinya sudah rusak dan kondisi drainase dan talud yang sudah rusak	Desa Danakerta, Kab. Banjarnegara	Punggelan	Danakerta	800 M	Rp 250,000,000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
106	1371	18-01-2023	SAFRUDIN	Rekonstruksi Ruas Jalan Kabupaten (Peningkatan Jalan, Pelebaran Jalan)	Lebar jalan masih 3 meter	Ruas Jalan Danakerta - Klapa, Kab. Banjarnegara	Punggelan	Klapa	2000 M	Rp 800,000,000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
107	2164	20-01-2023	SISWANTO	Rekonstruksi Ruas Jalan Kabupaten (Peningkatan Jalan, Pelebaran Jalan)	Kurang Lebar nya Ruas Jalan Kabupaten (Danakerta - Wanatangi)	Desa Sambong, Kab. Banjarnegara	Punggelan	Sambong	800 M	Rp 250,000,000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.....
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun
2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
		NIHIL			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

1. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, dengan program prioritas sebagai berikut:
 - a. Perlindungan sosial dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - c. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
2. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dengan program prioritas sebagai berikut:
 - a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila;
 - b. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
 - c. Memperkuat moderasi beragama;
 - d. Meningkatkan budaya literasi, inovasi dan kreativitas.
3. Memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik, dengan program prioritas sebagai berikut:
 - a. Konsolidasi demokrasi;
 - b. Penegakan hukum nasional;
 - c. Reformasi birokrasi dan tata kelola; dan
 - d. Menjaga stabilitas keamanan nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Punggelan pada kurun waktu 4 (Empat) tahun ke depan di susun dengan memperhatikan isu-isu strategis yang kemudian diterjemahkan kedalam tujuan dan sasaran-sasaran yang lebih terukur, spesifik dan rasional. Perumusan tujuan dan sasaran memperhatikan indikator-indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan yang

diuraikan sebagai berikut

- 1 Tujuan kecamatan Punggelan tahun 2023-2026 pasca penyalarsan adalah sebagai berikut :
 1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 2. Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik
- 2 Sasaran Kecamatan Punggelan Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :
 1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk Kewilayahan
 2. Meningkatnya Efektivitas dan Tranparansi Layanan Publik untuk urusan kewilayahan

3.3. Program dan Kegiatan

(Sajikan matriks yang berasal dari SIPD)

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Punggelan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Punggelan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7		UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01	KAMATAN													
7	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
7	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH													
7	01	2.07	Persediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							559.636.600					567.022.600
7	01	2.07	Persediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kemampuan dan Kelembagaan Kantor Semua Kelurahan	Kab. Banjarnegara	1 Tahun				250.000.000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				250.000.000
7	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							56.400.000					57.000.000
7	01	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kab. Banjarnegara	1 Tahun				8.400.000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun		9.000.000
7	01	2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemerintahan Daerah	terbayarnya jasa pelayanan kantor		1 Tahun				48.000.000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun		48.000.000
7	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							73.435.400					74.435.400
7	01	2.09	Pemeliharaan Biaya Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	terbayarnya jasa pelayanan umum kantor	Kab. Banjarnegara	8 Kendaraan	1 Tahun	8 Kendaraan		56.435.400	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinannya	8 Kendaraan		57.435.400
7	01	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang di Pelihara	Kab. Banjarnegara	8 Kendaraan	1 Unit	8 Kendaraan		15.000.000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinannya	8 Kendaraan		15.000.000
7	01	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terpeliharanya peralatan kantor	Kab. Banjarnegara	8 Kendaraan	1 tahun	8 Kendaraan		2.000.000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinannya	8 Kendaraan		2.000.000
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK												122.812.500
7	01	02	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum							20.000.000					21.000.000
7	01	02	Koordinasi Pemeliharaan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan	Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang	Kab. Banjarnegara	1 Laporan				20.000.000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				21.000.000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Punggelan														
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Punggelan														
Kode	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
	Usuran/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Tolok Ukur		Target	
	Prasarana Pelayanan Umum		Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum											
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat													
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah laporan Pelaksanaan Non Penzinan		Kab. Banjarnegara Punggelan, Semua Kelurahan		12 Laporan		9.329.000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				10.000.000
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		terlaksananya kegiatan Pajak Bumi dan Bangunan		Kab. Banjarnegara Punggelan, Semua Kelurahan		1 tahun		90.812.500	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				91.812.500
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa													
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	Jumlah lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	"Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa"	Kab. Banjarnegara Punggelan, Semua Kelurahan	10 Lembaga 10 Lembaga	17 Desa	10 Lemaga	10.000.000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		0*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	10. Lembaga 10. Lembaga	10.000.000
7 01 04	PRGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM													
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum													
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Tahun	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat	memberikan rasa aman dan nyaman kepada setiap warga	Kab. Banjarnegara, Punggelan, Semua Kelurahan	1 Laporan	1 Tahun	17 Desa	6.000.000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1 Tahun	1 Laporan	7.000.000
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM													
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah													
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Kab. Banjarnegara Punggelan, Semua Kelurahan		8 Kegiatan		10.000.000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				10.500.000
7 01 06	PROGRAM PEMBIINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA													
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa													
									33.659.700					35.274.700
									33.659.700					35.274.700

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Punggelan													
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Punggelan													
Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Target Capaian Kinerja Tolok Ukur	Target	Keluaran n Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7.01.06.2.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase terlaksananya program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		semua desa memahami perdas dan pakdes	Semua desa Tertib Administrasi	Kab. Banjarnegara, Punggelan, Semua Kelurahan	17 Desa	17 tahun	17 Desa	1.500.000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Persentase terlaksananya program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	17 Desa	2.000.000
7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi TataPemerintahan Desa	Persentase terlaksananya program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		semua Desa Tertib Administrasi	Semua desa Tertib Administrasi	Kab. Banjarnegara, Punggelan, Semua Kelurahan	17 Desa	17 Desa	17 Desa	3.500.000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Persentase terlaksananya program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	17 Desa	4.000.000
7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase terlaksananya program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		tertibnya administrasi pengelola keuangan	Semua desa Tertib Administrasi	Kab. Banjarnegara, Punggelan, Semua Kelurahan	17 Desa	17 Desa	17 Desa	3.500.000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Persentase terlaksananya program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	17 Desa	3.500.000
7.01.06.2.01.08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian PerangkatDesa	Persentase terlaksananya program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Semua desa Tertib Administrasi	Kab. Banjarnegara, Punggelan, Semua Kelurahan	17 Desa	8 Desa	17 Desa	3.774.700	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Persentase terlaksananya program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	17 Desa	3.774.700
7.01.06.2.01.17 Koordinasi PendamipangDesa di Wilayahnya	Persentase terlaksananya program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			Semua desa Tertib Administrasi		17 Desa		17 Desa	21.385.000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Persentase terlaksananya program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	17 Desa	22.000.000
TOTAL						559.636.600						567.022.600	0

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada perangkat daerah merupakan program prioritas dalam Renstra 2023-2026. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPD selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/ kegiatan di

Program pada perangkat daerah merupakan program prioritas dalam Renstra 2003-2026. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD selanjutnya dijabarkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/ kegiatan dijabarkan sebagai berikut :

Pertama Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan terdiri dari 6 Kegiatan: antara lain 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan dua sub kegiatan yaitu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja; 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan dua sub Kegiatan yaitu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD; 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan 1 Sub Kegiatan yaitu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor. 4) Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 3 Sub Kegiatan yaitu Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya ,Pengadaan Mebeler dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor

Lainnya ; 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 2 Sub Kegiatan yaitu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor; 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 1 Sub Kegiatan antara lain, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan .

Kedua Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terdiri dari Kegiatan yaitu 1)Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan 2 Sub Kegiatan yaitu Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan yang lain yang di Limpahkan; 2) Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dengan satu sub kegiatan yaitu Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan /atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum.

Ketiga Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri dari satu kegiatan Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan 8 sub kegiatan yaitu Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa,Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa,Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa , Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa, Fasilitasi Pengelolaan Desa dan Pendayaan Aset Desa , Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum,Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Koordinasi Pendampingan di Wilayahnya .

Keempat Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terdiri dari satu Kegiatan yaitu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan satu Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2022-2026. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah tahun 2022-2026. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal : Januari 2024

TIM PENYUSUN SAKIP
KASUBAG PERENCANAAN DAN
KEUANGAN



RIRIN DWI HASTUTI NUGRAHENI
NIP.19770517 201001 2 002